

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)

S.D. Monica¹, W. Karia², W. Wijaya³

¹²³Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas PGRI Sumatera Barat, Padang, Indonesia
e-mail: sherlydwimonica612@gmail.com¹, wazasolok@gmail.com², wibiwijaya@upgrisba.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena gelandangan dan pengemis marak terjadi di Kota Padang atau di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait fenomena gelandangan dan pengemis. Fokus penelitian ini kepada peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Padang dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL. Sementara metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan tipe deskriptif. Melalui informan Kantor Dinas Sosial dalam pelaksanaan menangani masalah gepeng di Kota Padang untuk meningkatkan pelayanan, penanganan serta penanggulangan kemiskinan serta efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial di Kota Padang melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya. Hasil penelitian Peran Dinas Sosial Kota Padang Dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis terdapat hasil penelitian menunjukkan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Padang ada beberapa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, kampanye dan sosialisasi.

Kata kunci: Dinas Sosial; Gelandangan dan Pengemis; Peran

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of homelessness and beggars occurring frequently in Padang City or in West Sumatra Province. For this reason, it is necessary to carry out more in-depth research regarding the phenomenon of homelessness and beggars. The focus of this research is on the role of the Social Service in handling homeless people and beggars. The aim of this research is to analyze the role of the Padang City Social Service in tackling homelessness and beggars in Padang City. This research uses Talcott Parsons' functional structural theory with the AGIL scheme. Meanwhile, the research method used is qualitative with a descriptive type. Through informants from the Social Service Office in the implementation of dealing with the problem of sprawl in the City of Padang to improve services, handling and overcoming poverty as well as the effectiveness and efficiency of the social protection system in the City of Padang by increasing access for poor households and people with other social problems. Research results show the role of the Padang City Social Service in tackling homelessness and beggars. There are research results that show that in dealing with homelessness and beggars in Padang City, there are several roles carried out by the Social Service, namely data collection, monitoring, control, supervision, campaigning and socialization.

Keywords: Social Services; Homelessness and Beggars; Role

PENDAHULUAN

Kemiskinan itu sendiri merupakan permasalahan yang selalu timbul di negara berkembang dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Walaupun sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya penghapusan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata sangat kompleks (Dzalila et al., 2020).

Gepeng (gelandangan dan pengemis) merupakan gambaran orang-orang tak berdaya yang tidak mampu berkompetisi disektor formal karena pendidikan, perekonomian bahkan kesehatan ditingkat rendah. Oleh karena itu mereka tidak mampu mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum

lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja serabutan yang tidak membutuhkan modal, pengetahuan dan skil. Termasuk meminta-minta Ramadhanita, 2019).

Di kota-kota besar Indonesia, gelandangan dan pengemis ialah bentuk fenomena yang umum terlihat. Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi akibat efek samping dari proses pembangunan Nasional sehingga masyarakat beranggapan kondisi ini berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diidamkan, tidak dapat ditoleransi, dan merupakan bentuk ancaman terhadap nilai-nilai dasar anggota masyarakat serta memerlukan tindakan bersama untuk menyelesaikannya (Saadah et al., 2022).

Ketidakselarannya antara pembangunan di perkotaan dengan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan menyebabkan perbedaan yang semakin jauh, antara wajah desa dan profil perkotaan. Perbedaan tersebut telah mendorong terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota. Perkotaan dipandang lebih menjanjikan untuk mencari pekerjaan sehingga bisa merubah nasib mereka. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kaum urban tersebut kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan untuk memperoleh tempat berteduh (Sari & Bakar, 2020). Akibat yang terjadi adalah mereka mengemis untuk bertahan hidup dan menggelandang, yang kemudian dikenal dengan Gepeng (Sari & Bakar, 2020).

Keberadaan gelandangan dan pengemis berdasarkan *push factor*, Gepeng sebagian besar datang dari perdesaan, mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, kurang memiliki keterampilan yang memadai serta minimnya kesempatan kerja yang “disediakan” daerah asal. Mereka terdorong akan kebutuhan dan penghidupan yang layak (Asmara, 2018).

Kemiskinan itu sendiri merupakan permasalahan yang selalu timbul di negara berkembang dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Walaupun sudah banyak program-program yang ditujukan dalam upaya penghapusan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata sangat kompleks (Swaramarinda, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah pada tanggal 02 April 2024 lalu. Diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang, gelandangan dan pengemis banyak terlihat di Perempatan Jalan Khatib Sulaiman, Perempatan Kantor Pos besar jalan Sudirman, Pasar Raya Kota Padang, Jalan Ratu Langi, Jalan Patimura, Jalan Bypass, Perempatan Lubuk Begalung dan tempat wisata di Kota Padang seperti sepanjang jalan Pantai Padang. Di tempat-tempat tersebut telah sering dilakukan razia untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis yang berkeliaran tujuannya untuk mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis. Ternyata setelah diamati asal gepeng banyak dari luar kota Padang seperti misalnya dari Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, Pesisir dan sekitar Kota Padang. Bahkan ada juga yang berasal dari luar Sumatera Barat, seperti Pekanbaru, Bengkulu, Jambi dan daerah lainnya.

Tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan gepeng. Hal ini dikarenakan gepeng bertahan di tempat penampungan karena melihat Covid-19 mengharuskan warga melakukan PSBB dimana aktivitas di lingkungan terbuka harus dikurangi, hal inilah yang menjadikan gepeng bertahan ditempat tersebut karena keramaian di lingkungan luar sudah dibatasi dan memungkinkan mereka tidak dapat pendapatan. Alasan inilah yang membuat aktivitas razia dapat berjalan dengan baik yang membuat para gepeng dapat tertibkan keberadaannya.

Sementara itu, pada tahun 2022 hingga 2024 terjadi penurunan angka gepeng karena pada tahun inilah aktivitas masyarakat kota Padang kembali normal dan gepeng bisa beraktivitas seperti biasanya sehingga mereka bisa dengan leluasa menghindar pada saat terjadinya razia di kota Padang. Berbagai cara pun telah dikerahkan oleh Dinas Sosial Kota Padang untuk menertibkan dan memberikan pelatihan keterampilan terhadap pengemis. Bentuk penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial ada berupa peraturan larangan kepada masyarakat Kota Padang untuk tidak diperbolehkan memberi uang kepada gepeng. Pemulangan gepeng ke tempat asal namun upaya ini juga tidak berhasil ada beberapa gepeng yang balik lagi ke kota Padang dan menjadi gepeng lagi, dan juga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pemberian pelatihan keterampilan sayangnya, dengan pelatihan keterampilan yang diikuti oleh pengemis tidak membentuk karakter mereka

menjadi lebih terlatih sehingga sikap pengemis yang membandel tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara dan membuat keberadaannya mulai meresahkan di lingkungan masyarakat.

Dampak publik jika permasalahan gepeng tidak diatasi maka akan banyak menimbulkan permasalahan seperti mengganggu ketertiban umum, mengganggu kebersihan dan keindahan kota, mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dan ketertiban, masalah kependudukan, serta menimbulkan kriminalitas. Gepeng meningkat akibat buruknya kondisi sosial ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya keterampilan kerja, pendidikan rendah, aspek sosial budaya dan kesehatan (Anatan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian, apa yang sudah ditemukan dilapangan mengenai pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Padang terhadap masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial tentang penertiban gelandangan dan pengemis belum sepenuhnya berhasil di tangani dengan baik, karena masih banyak kita temukan gelandangan dan pengemis di jalan raya dan di berbagai fasilitas umum, gelandangan dan pengemis ini tidak takut dengan razia yang dilakukan oleh Satpol PP malahan mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat agar mereka dikasihani sehingga mereka mendapat keuntungan yang sangat besar (Wahyulianti, 2022).

Penguraian diatas dapat dikatakan bahwa gepeng adalah salah satu permasalahan yang berangkat dari kemiskinan, permasalahan ekonomi, ketimpangan pembangunan, pendidikan, dan mental yang ada di Kota Padang. Akan tetapi, kedua itu mempunyai perbedaan dalam permasalahan sosial.

METODE

Metode penelitian ilmiah sangat penting digunakan dalam suatu penelitian agar menghasilkan keberhasilan tujuan, karenanya metode yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan tujuan yang telah disusun (Hidayat & Mesra, 2023). Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset deskriptif dan condong menggunakan analisis. Penelitian studi kasus adalah penyelidikan mendalam dari berbagai informasi mengenai beberapa kasus untuk 1 periode atau beberapa periode (Anggriana, 2016).

Analisis data pada penelitian kualitatif yakni ketika pengumpulan data. Dengan demikian data tersebut dapat direduksi, mereduksi data merupakan usaha pengumpulan data, selanjutnya mengelompokan data dalam kategori dan satuan konsep tertentu, serta temanya. Produk reduksi data diolah sedemikian rupa agar dapat dilihat sosoknya lebih lengkap. Boleh sinopsis, sketsa, matriks, dan lainnya. Langkahnya tidak satu kali langsung jadi. Akan tetapi berjalan terkait bolak balik. Setelah itu baru data dapat disajikan, dan disimpulkan dan diverifikasi data penelitian (Ahmad & Muslimah, 2021).

Penulis menggunakan metode ini karena sesuai dengan apa yang akan dibahas, yakni mengenai suatu kasus masalah kesejahteraan sosial yakni gepeng. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif, agar dapat memahami bagaimana efektivitas tindakan Dinas Sosial dalam menanggulangi gepeng, serta dapat menjabarkan secara terperinci mengenai peristiwa dan pengalaman yang penulis temukan selama melakukan penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi yang valid. Berdasarkan aktivitas wawancara yang dilakukan, peneliti menetapkan beberapa informan untuk memperoleh informasi yang valid dari Kabid Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dari data informan diatas pada penelitian ini juga menetapkan karakter seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai gepeng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara (Nasution, C., & Thamrin, H, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan gelandangan dan pengemis jalanan di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis terkhusus di jalanan besar di kota Padang. Yang disebabkan oleh berbagai hal, terutama masalah ekonomi dan pendidikan. Dinas Sosial Kota Padang yang merupakan

lembaga yang bertanggung jawab terhadap gelandangan dan pengemis dikawasan jalan utama kota Padang, telah melakukan berbagai upaya. Masalah sosial pengemis dan gelandangan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada dikawasan perkotaan.

Masalah Sosial gelandangan dan pengemis ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan daerah tentang pengemis dan gelandangan di Kota Padang. Kebijakan tersebut di keluarkan oleh pemerintah Kota Padang yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat Kota Padang khususnya. Untuk mengetahui lebih lanjut peran Dinas Sosial Kota Padang dalam menangani gelandangan dan pengemis dikawasan jalan utama Kota Padang, berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Padang. Bapak Indra Syafri dalam hal ini selaku Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda & RSTS/KPO : “ Dinas sosial dalam melaksanakan perannya mengacu pada SOP yang ada, dimana diamanahkan untuk dibentuk beberapa tim patroli yang bekerja sama dengan instansi terkait yang terdiri dari 3 unsur yaitu Dinas Sosial Kota Padang, Satpol PP dan Polisi. Dimana tim kami melakukan patroli mobil di titik lampu merah jalan utama yang ada di Kota Padang.

“Berdasarkan Hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dinas sosial bekerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Satpol PP dan Polisi untuk melaksanakan patroli guna untuk memberantas gelandangan dan pengemis. Pendataan merupakan salah satu langkah awal Dinas Sosial Kota Padang untuk mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Dinas Sosial memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah gelandangan dan pengemis di kawasan jalan utama dan pasar raya Kota Padang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Indra Syafri sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda & RSTS/KPO berikut ini : “ ketika tim kami melakukan patroli biasanya sebelum itu kami mendapatkan kabar terlebih dahulu dari intel satpol PP bahwasanya dikawasan tersebut terdapat gelandangan dan pengemis, selanjutnya kami bawa ke kantor untuk melakukan pendataan untuk mengetahui identitas para pengemis dan gelandangan .”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penanganan pengemis dan gelandangan ini, Dinas Sosial Kota Padang melakukan patroli di sekitar daerah jalan utama atau tempat-tempat umum, kemudian dilakukan pendataan berdasarkan hasil wawancara, dimana pendataan tersebut Dinas Sosial Kota Padang dapat mengetahui identitas anak jalanan tersebut, dengan cara menanyakan alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Jumardi (40 tahun) asal Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pengemis di jalan utama di Kota Padang, berikut ini : “ Saya pernah ditangkap sama Dinas Sosial dan dibawa ke kantor, sampai disana saya hanya di data dan dijelaskan kalau ada larangan untuk tidak melakukan aktivitas disini, tapi mau apa dek, demi menghidupi sehari-hari dan sekaligus merefleksikan diri, karena permasalahan dirumah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Padang saat melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan tersebut. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas gelandangan dan pengemis.

Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah gelandangan dan pengemis, dengan cara melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti yang disampaikan oleh Bapak Efrizal selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan (52 tahun), berikut ini : “Kami melakukan patroli rutin setiap hari untuk memantau anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di Kota Padang

disetiap kecamatan, Namun ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada yang kedapatan melakukan aktivitasnya, maka pihak aparatpun yang turun melakukan patroli langsung untuk segera menjaring yang kedapatan (tertangkap basah) melakukan aktivitasnya di jalan utama dan tempat umum maka akan ditindak lanjuti “.

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha pemantauan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Padang yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan utama dan tempat umum di Kota Padang, setelah melakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan selalu kegiatan kemudian selanjutnya Dinas Sosial kota padang menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi keberadaan peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang dijalanan dan tempat umum. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada gelandangan dan pengemis. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media maupun tulisan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Indra Syafri sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda & RSTS/KPO , berikut hasil wawancaranya : “ Untuk mengenai gelandangan dan pengemis kami melakukan kampanye dengan cara kami memasang spanduk dan baliho mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis ,gelandangan dan bisa membahayakan pengguna jalan maupun orang-orang jalan pada umunnya, tetapi yang menjadi hambatan bagi kami adalah walaupun kami telah menyuarakan dimedia online dan cetak tetapi sikap masyarakat yang acuh yang tetap memberikan mereka uang contohnya mereka memberikan uang kepada pengemis lalu mereka berselfie ,hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih ingin menunjukkan sikap kedermawanannya di media , hal ini yang menyulitkan kami untuk melakukan penertiban tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu dengan kampanye dimedia sosial dan cetak mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan.

Menurut hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Indra Syafri mengatakan : “ kegiatan pembinaan pencegahan itu kita lakukan melalui beberapa tahap yang pertama pendataan langsung kelapangan, kemudian yang kedua yaitu kami lakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan melalui kegiatan patroli, dan yang terakhir dalam kegiatan pembinaan pencegahan kami lakukan kampanye sekaligus mensosialisasikan akan larangan bagi gelandangan dan pengemis melakukan aktivitasnya ditempat umum.”

Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, guna mengefektifitaskan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padang yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu :

- a. Pendataan
- b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- c. Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

Dari ketiga bentuk kegiatan tersebut juga tidak dilakukan begitu saja, tetapi ada alur dari ketiga kegiatan pembinaan pencegahan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dicocokkan dengan isi peraturan yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Padang, maka Penulis dapat menggambarkan kerangka dari proses pembinaan pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial kota Padang dalam hal ini Dinas Sosial Kota pada yang bekerja sama dengan institusi seperti Satpol PP, TNI, POLRI. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitik beratkan ke meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang melakukan aktifitasnya ditempat umum. Hasil wawancara dengan bapak Indra Syafri mengatakan : “Sebenarnya tahap lanjutan ini merupakan lanjutan dari pembinaan pencegahan yang dilakukan sebelumnya, yang kita lakukan pada tahap ini adalah dengan melaksanakan penertiban anak jalanan memberikan edukasi tentang LPKS bersama TNI.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Sosial Kota Padang bekerjasama dengan TNI untuk menertibkan anak jalanan, lalu mereka diberikan edukasi tentang LPKS. LPKS ini

adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Bagi anak-anak jalanan yang jadi gelandangan dan pengemis yang berada di LPKS ini berikan edukasi mengenai pendidikan rohani dan jasmani selama 3 bulan paling lama. Pembinaan yang dilakukan selama masa penampungan sementara atas bimbingan sosial, bimbingan mental, spiritual, bimbingan hukum, serta adaptasi sosial atau outbond. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak-anak jalanan dengan cara menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia ini masih melakukan aktivitasnya sebagai pengemis dan gelandangan.

Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui masalahnya maka pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut. Pada umumnya pembinaan rehabilitasi yang dilakukan untuk anak-anak yang menjadi gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori usia produktif dan usia sekolah terdiri atas tiga bentuk dalam pembinaan rehabilitasi yaitu bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

Pertama memberikan bimbingan secara mental dan spiritual. Dimana pembinaan bimbingan mental dan spiritual yaitu dengan melakukan pembentukan sikap serta perilaku kepada anak jalanan, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok. Dimana pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif kepada anak-anak tersebut ketika dikembalikan ke masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental spiritual ada hal-hal yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

Kedua, memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan fisik. Dimana pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak jalan tersebut. Ketika pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak yang menjadi pengemis dan gelandangan tersebut. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka anak-anak tersebut dihentikan dalam proses pemberian pembinaan rehabilitasi di dalam LPKS.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menganalisa data, keterangan dari berbagai narasumber yang penulis peroleh maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut, Dinas Sosial Kota Padang telah melakukan beberapa peran, Pendataan adalah sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Padang.

Tujuannya untuk mempermudah Dinas Sosial dalam mengidentifikasi gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan utama Kota Padang. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui identitas diri, alamat, keluarga, daerah asal, dan alasan gelandangan dan pengemis tersebut berada di jalanan Kota Padang. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan ini sebagai langkah selanjutnya Dinas Sosial untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat umum, pasar raya, dan jalanan utama Kota Padang dimana gelandangan dan pengemis tersebut melakukan aktivitasnya. Kegiatan ini Dinas Sosial Kota Padang bekerja sama dengan Satpol PP yang bertugas untuk berkeliling ditempat yang telah ditentukan. Kampanye dan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan dan tempat umum. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada gelandangan dan pengemis. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media maupun tulisan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya patuh terhadap larangan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), 173-186. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 30–40. <https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.78>
- Asmara, A. D. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok the Identification of Smoking Behavior Factors Towards the Students in. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 23–30. <https://journal.student.uny.ac.id/fipbk/article/view/10872>
- Dzalila, L., Ananda, A., & Zuhri, S. (2020). Pengaruh Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Pemahaman Belajar Mahasiswa. *Jurnal Signal*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.33603/signal.v8i2.3518>
- Hidayat, M. F., & Mesra, R. (2023). Pola Adaptasi Sosial Masyarakat Pindahan Desa Motoling di Dusun Jauh Pelita, Desa Tondei, Motoling Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1368–1375. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5102>
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 105–119. <https://doi.org/10.31289/publika.v4i2.415>
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 63–76. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>
- Swaramarinda, D. R. (2014). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 2(2), 63. <https://doi.org/10.21009/jpeb.002.2.5>
- Wahyulianti, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 6(2), 1–10. [https://doi.org/10.25299/jkp.2020.vol6\(2\).4963](https://doi.org/10.25299/jkp.2020.vol6(2).4963)